

PANCASILA: LANDASAN FILOSOFIS DAN SUMBER PENGATURAN KEHIDUPAN NASIONAL

Budisantoso Suryosumarto*)

Segala kegiatan dan tingkah laku manusia budaya (civilized people) pada umumnya dimulai dari filosofi (filsafat) yang diyakini kebenarannya. Dasar filosofis ini merupakan tuntunan bagi segala kegiatan dan tingkah laku manusia yang menganutnya, dalam menyelenggarakan kehidupan nasional yang bersifat politik kenegaraan, strategis, taktis sampai ke kegiatan teknis.

Para pendahulu kita yang merupakan *the founding fathers* Negara Kesatuan RI (NKRI) yang mewakili berbagai suku, etnik dan golongan agama, telah dengan arif menetapkan dasar filosofis (*philosophische grondslaag*) bagi berdirinya negara Republik Indonesia dan pengaturan kehidupan nasional. Dasar filosofis tersebut adalah Pancasila, dalam Pembukaan UUD 1945 juga memuat cita-cita nasional Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; tujuan nasional: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdas-

kan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita nasional merupakan *light star* dan tujuan nasional merupakan *national goal (never ending goals)* yang harus diupayakan pencapaiannya melalui pengamalan Pancasila.

Pengamalan Pancasila haruslah meliputi pengalaman obyektif melalui UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, dan pengamalan subyektif oleh para penyelenggara negara dan seluruh warga masyarakat Indonesia, serta lembaga/organisasi pemerintah dan kemasyarakatan, dalam sikap

*) Widyaiswara Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

dan tindakannya yang tidak menyeleweng dari nilai-nilai luhur Pancasila. Lima sila dari Pancasila adalah merupakan kebulatan yang utuh dan harmonis yaitu nilai religius yang manusiawi dalam kebersamaan, persatuan dan kehidupan yang demokratis menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalau kita menengok ke belakang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sampai saat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pengamalan Pancasila, baik secara obyektif dan subyektif. Pengalaman sejarah perjuangan bangsa yang telah menelan korban jiwa, harta benda dan penderitaan sebagian besar warga bangsa, hendaknya dapat dipelajari dan dikaji bangaiaman pengamalan Pancasila dari awal kemerdekaan sampai saat ini.

Tinjauan terhadap Pengamalan Pancasila

Pada awal kemerdekaan sampai tahun 1959, pengamalan nilai demokrasi menjurus ke arah sistem liberal berdasarkan UUD RIS dan kemudian UUDS. Hal ini ditandai dengan banyaknya partai (multi partai); Pemerintah tidak stabil, karena de-

ngan mudah dapat dijatuhkan oleh Parlemen. Pancasila terancam diganti oleh ideologi lain, seperti komunisme dan Islam DI/TII. Timbul gerakan separatisme yang mengancam persatuan Indonesia. Pembangunan sosial ekonomi belum dapat berjalan, masih jauh dari nilai adil dan makmur (keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia).

Pada tahun 1959, konstituante hasil Pemilu 1955, tidak berhasil menetapkan UUD yang baru untuk menggantikan UUDS. Dalam situasi yang mengancam persatuan bangsa, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendekritkan kembali ke UUD 1945, namun kemudian pengamalannya banyak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Pada masa Orla, nilai Persatuan Indonesia sangat ditekankan, pemberontakan dan gerakan separatis dapat ditumpas, Irian Barat dapat dikembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun nilai demokrasi cenderung diabaikan, semua kekuatan dipusatkan pada Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Di bidang politik luar negeri, Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia, serta keluar dari PBB dan membentuk NEFO (*New Emerging Forces*). Pembangunan ekonomi guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga tera-

baikan. Kondisi tersebut banyak mengandung kerawanan, memberikan peluang bagi G30S/PKI mengadakan *coup d'tat* pada tahun 1965.

Setelah G30S/PKI dapat ditumpas Orba berusaha dan bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada mulanya dari tahun 1968 sampai awal tahun 1980-an, hasil-hasil pembangunan nasional sudah memberikan harapan, taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pada umumnya meningkat, stabilitas nasional dapat dikendalikan. Namun kehidupan demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan cenderung diabaikan. Pemerintah cenderung otoriter represif. Pada periode Orba, Timor Timur berintegrasi dalam NKRI sebagai propinsi yang ke-27, namun proses integrasi ini belum dapat dituntaskan, sehingga belum diakui oleh PBB, walaupun Indonesia telah banyak mencurahkan dana dan tenaga untuk membangun Timor Timur. Kondisi kehidupan nasional pada awal tahun 1990-an diperparah dengan terjadinya KKN, krisis moneter dan krisis ekonomi yang berkelanjutan. Timbul krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Orba, memicu gerakan reformasi, yang berakibat tumbangannya pemerintahan Orba pada tahun 1998.

Dari tahun 1988 sampai saat ini bangsa Indonesia seakan-akan kembali pada masa tahun 1950-an, terjadi lagi *try and error* dalam mengamalkan Pancasila. Dalam kehidupan nasional terjadi kebebasan (demokrasi) yang kebablasan yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, golongan dan daerah asalnya. UUD 1945 telah empat kali diamandemen yang cenderung mengabaikan Pembukaannya. KKN bertambah marak dan makin merata, hutang pemerintah dan swasta makin membengkak. Terjadi banyak konflik antaretnis, antargolongan agama dan gerakan teror. Setelah Timor Timur terlepas dari NKRI gerakan separatistis masih belum mampu diatasi, khususnya di Propinsi Papua, Propinsi NAD dan Propinsi Maluku. Pembangunan ekonomi nyaris terhenti, pengangguran dan penduduk miskin meningkat drastis, berakibat merajalelanya kriminalitas yang cenderung makin sadis. Para pemimpin dan para pengamat sibuk berdebat dan berpolemik demi kepentingan masing-masing, kurang menaruh perhatian terhadap kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Sebagian besar rakyat menderita dalam kemiskinan, pengangguran, kelaparan serta ditimpa bencana alam banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain-lain. Partai

politik sudah ratusan jumlahnya yang ingin turut dalam Pemilu 2004, akan sangat membingungkan warga masyarakat pada umumnya, dapat diperkirakan sulit untuk membentuk yang solid pada pasca-Pemilu 2004, tanpa sikap dan tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi dan partainya. Demikian pula Komite Konstitusi diharapkan dapat mengkaji ulang dengan jernih amandemen UUD 1945, agar tidak menyimpang dari Pembakuan UUD 1945.

Pentingnya Paradigma Nasional

Dari uraian tentang pengamalan Pancasila, baik secara obyektif maupun secara subyektif dari awal kemerdekaan sampai saat ini, sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis dalam negeri dan luar negeri. Di samping itu juga sangat tergantung kepada pola pikir, pola sikap dan pola tindak para pemimpin bangsa di kalangan pemerintahan (suprastruktur) dan di kalangan masyarakat (infrastruktur dan substruktur). Para senior pendahulu di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) telah dengan arif meletakkan landasan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang dinamakan Paradigma Nasional

agar pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif oleh para penyelenggara negara, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat pada umumnya, secara bertahap dapat menuju ke cita-cita dan tujuan nasional.

Paradigma Nasional tersebut sampai saat ini masih diyakini kebenarannya, khususnya di lingkungan keluarga besar Lemhannas RI, dengan tata urutan mulai dari yang bersifat filosofis sampai yang bersifat strategis, sebagai berikut.

1. Pancasila

Pancasila merupakan landasan filosofis sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional. Di samping ada golongan yang sejak semula ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, ada beberapa pakar/intelektual yang menganggap Pancasila sebagai utopia, sulit diwujudkan. Namun dengan mengingat kondisi bangsa Indonesia yang sangat majemuk yang memiliki wilayah kepulauan yang luas, sangat memerlukan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila menuju terwujudnya masyarakat yang bersatu, adil dan makmur. Pengamalan Pancasila yang hanya terfokus pada salah satu nilai atau tidak dalam keutuhan telah terbukti mengakibatkan kemunduran kembali (*setback*) dalam

rangka perjuangan bangsa, sehingga Indonesia makin tertinggal oleh negara-negara lain. Dengan masih belakunya Pembukaan UUD 1945, TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 yang menyatakan Pancasila sebagai Dasar Negara, maka pengamalan Pancasila bersifat perintah (imperatif), terutama bagi para penyelenggara negara. Pancasila harus merupakan nilai dasar yang melandasi aturan hukum dan tindakan para penyelenggara negara.

2. UUD 1945

UUD 1945 merupakan landasan konstitusional. Pasal-pasal dari UUD 1945 adalah sebagai penjabaran dari Pembukaan dan sekaligus sebagai penjabaran Pancasila guna mengatur kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Pasal-pasal UUD 1945 dapat diamandemen/diubah sesuai tuntutan perkembangan jaman, namun tidak boleh bertentangan dengan Pembukaannya.

3. Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara (Wasantara) merupakan landasan visional, terutama didasari oleh geopolitik Indonesia dan Pancasila. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan yang

luas, dihuni penduduk Indonesia yang besar jumlahnya dan sangat heterogen (majemuk). Wasantara mengajarkan pentingnya persatuan bangsa Indonesia dan kesatuan (keutuhan) wilayah Nusantara. Tanpa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah, NKRI akan tercabik-cabik menjadi negara-negara kecil, akan terulang politik *divide et impera* dalam bentuk baru, antara lain dalam bentuk dominasi politik dan ekonomi oleh bangsa lain. Oleh karena itu persatuan bangsa Indonesia dan keutuhan wilayah Nusantara merupakan prasyarat tercapainya tujuan nasional. Visi setiap penyelenggara merupakan prasyarat tercapainya tujuan nasional. Visi setiap penyelenggara negara dan segenap bangsa Indonesia hendaknya merupakan kondisi yang diinginkan agar persatuan bangsa Indonesia makin kokoh dan kedaulatan negara dapat makin tegak di seluruh wilayah Nusantara.

4. Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional (Tannas) merupakan landasan konseptual, terutama didasari oleh geostrategi Indonesia dan Pancasila. Tannas mengajarkan pentingnya keterpaduan (integrasi) segenap aspek kehidupan nasional, dengan mengelola dan memanfaatkan aspek alamiah

(wilayah/geografi, sumber kekayaan alam, dan kependudukan) guna meningkatkan kondisi sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan), sehingga diperoleh keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia guna mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam dan luar negeri. Dalam rangka mewujudkan segenap aspek kehidupan nasional yang terpadu, diperlukan kualitas kepemimpinan nasional yang handal (mumpuni).

Di samping Paradigma Nasional yang telah diuraikan di atas, Lemhannas juga telah mengembangkan konsepsi-konsepsi yang sangat erat kaitannya dengan paradigma nasional, yaitu:

1. Kewaspadaan Nasional (Padnas), dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang timbul dari perkembangan lingkungan strategis dalam dan luar negeri dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila.

2. Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) dan Kepemimpinan Nasional, dalam rangka menciptakan kehidupan nasional yang demokratis menuju tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Sismennas mengajar-

kan adanya arus masuk dari Tata Kehidupan Masyarakat (TKM) berupa kepentingan/aspirasi dan kader kepemimpinan melalui Tata Politik Nasional (TPN), kemudian masuk ke Tata Administrasi Negara (TAN). Selanjutnya dilaksanakan oleh Tata Laksana Pemerintahan (TLP). TKM dapat memberi respon positif berupa partisipasi atau respon negatif berupa arus masuk/tambahan (umpan balik). Demikian seterusnya siklus tersebut terselenggara dengan tertib oleh para penyelenggara negara dan organisasi politik serta organisasi kemasyarakatan, sehingga secara bertahap bangsa Indonesia makin maju, mampu mengejar ketertinggalannya dari bangsa lain.

Peluang dan Kendala

Dalam era reformasi saat ini pengamalan Pancasila kendala yang cukup berat, namun peluangnya walaupun tidak besar masih ada. Kendala dan peluang yang dominan (*significant*) adalah sebagai berikut.

1. Kendala: (a) Amandemen UUD 1945 cenderung menyimpang dari Pembukaan UUD 1945; (b) Organisasi Politik (Partai) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bebas menentukan asasnya. Ada yang tidak menggunakan Pancasila sebagai asasnya. Tentunya asas ini akan

terus diperjuangkan agar berhasil diwujudkan dalam kehidupan kenegaraan; (c) Ada sebagian pakar dan politisi yang alergi terhadap Pancasila, mereka menganggap Pancasila yang mengakibatkan situasi krisis. Di samping itu ada pula yang beranggapan bahwa Pancasila merupakan "utopia", mereka cenderung menganut paham klasik yang sudah ada yaitu liberalisme dan kapitalisme; (d) Penderitaan rakyat yang masih berkelanjutan sejak tahun 1998 sampai saat ini mengakibatkan rakyat apatis, sebagian lagi kembali kepada suku, etnik atau daerahnya yang cenderung menjurus kepada primordialisme:

2. Peluang: (a) Dalam sidang/rapat Komisi Konstitusi terdapat peluang untuk meluruskan kembali UUD 1945; (b) Masih ada Parpol dan Ormas yang tetap beraskan Pancasila. Tentunya Parpol dan Ormas tersebut akan terus memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional; (c) Pancasila masih ditetapkan oleh MPR sebagai dasar negara dan ideologi nasional berarti merupakan perintah kepada para penyelenggara negara untuk mengamalkan Pancasila, walaupun dia berasal dari Parpol atau Ormas yang tidak beraskan Pancasila. (Dalam hal ini perlu diingat Sumpah Jabatan Presiden, Wakil Pre-

siden, Anggota MPR/DPR dan penyelenggara negara lainnya); (d) Adanya pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dan kursus reguler serta kursus singkat di Lemhannas merupakan peluang bagi pemahaman dan pengamalan Pancasila. Di samping itu juga pendidikan kader Parpol dan Ormas yang beraskan Pancasila merupakan kader insan Pancasila sejati; (e) TNI yang ber-Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta Polri dengan Tri Bratanya, merupakan kekuatan pendukung dan pembela Pancasila.

Penutup

Walaupun pada era reformasi saat ini dan pada masa mendatang, pengamalan Pancasila menghadapi kendala yang cukup berat. Namun seluruh insan Pancasila diharapkan akan terus berjuang, terutama melalui jalur pendidikan baik formal maupun non formal dengan memanfaatkan peluang yang ada, termasuk perjuangan dalam Komisi Konstitusi. Parpol dan Ormas yang beraskan Pancasila itu perlu menyamakan persepsi, visi dan misi sebelum dan setelah Pemilu 2004, demi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.

Selain itu diperlukan situasi yang kondusif dalam bidang pertahanan dan keamanan, di mana TNI mampu menegakkan ke-

daulatan negara, Polri mampu memberantas kriminalitas dan menciptakan keamanan dan ke-

tertiban masyarakat (kamtibmas).